



2020

ZV

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERITAH
TAHUN 2020**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

URUS IZIN SENDIRI ITU

MUDAH

SETIA #MelayaniJakarta



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C 22

☎ 1500164 🌐 pelayanan.jakarta.go.id **f** /PelayananJakarta **t** @layananjakarta **i** @layananjakarta **y** /layananjakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta telah dapat diselesaikan.

LKIP Tahun 2020 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada Tahun 2020, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

LKIP Tahun 2020 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memuat informasi tentang penyelenggaraan pelayanan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Akhir kata, disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Tahun 2020 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 29 Januari 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta



Benni Agusandora
NIP. 196908081997031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPSTSP PROVINSI DKI JAKARTA	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA	5
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
1. VISI	6
2. MISI	6
3. TUJUAN DAN SASARAN	7
4. INDIKATOR KINERJA	8
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	11
1. TARGET DAN REALISASI KINERJA	12
2. REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DIBANDINGKAN CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	13
3. REALISASI KINERJA DAN TARGET TAHUN 2020	13
4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN, TANTANGAN DAN PENINGKATAN KINERJA	14
5. ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA	26
6. ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN KINERJA	28
B. REALISASI ANGGARAN	33
C. PENGHARGAAN	36
BAB IV PENUTUP	37

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Terdapat dua indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 dan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 serta program prioritas Pemerintah provinsi DKI Jakarta lainnya. Dua indikator kunci tersebut adalah realisasi investasi dan indeks kepuasan masyarakat. Adapun pencapaian indikator tersebut secara keseluruhan mencapai 94% atau masuk dalam kategori berhasil.

Jumlah alokasi anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target tersebut sebesar Rp.529.794.412.438,- dengan penyerapan sebesar Rp. 449.344.352.307,- atau 84,81%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.392.329.355.222,- dengan penyerapan sebesar Rp. 317.113.681.039,- atau 80,83% dan Belanja Langsung sebesar Rp.137.465.057.216,- dengan penyerapan sebesar Rp. 132.230.671.268,- atau 96,19%.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upaya reformasi birokrasi dan regulasi yang mengatur tentang kegiatan usaha telah dianggap sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan suatu kondisi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya reformasi birokrasi tersebut dilakukan melalui reformasi birokrasi perizinan dan non perizinan. Upaya yang dilakukan dalam reformasi birokrasi tersebut adalah mengurangi dan mempersingkat jumlah maupun waktu administrasi pengurusan berbagai prosedur yang harus dilalui oleh pelaku usaha.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam perizinan dan non perizinan maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta serta Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan capaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2020 dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. TUJUAN

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Menjadikan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
- c. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020; dan
- d. Hasil evaluasi akan menjadi acuan perbaikan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP PROVINSI DKI JAKARTA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP, DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMPTSP mempunyai tugas pelayanan dan penandatanganan izin dan non izin yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan perencanaan, pengembangan, pelayanan pengaduan dan komunikasi masyarakat, pengelolaan sistem teknologi informatika dan atas penyelenggaraan PMPTSP.

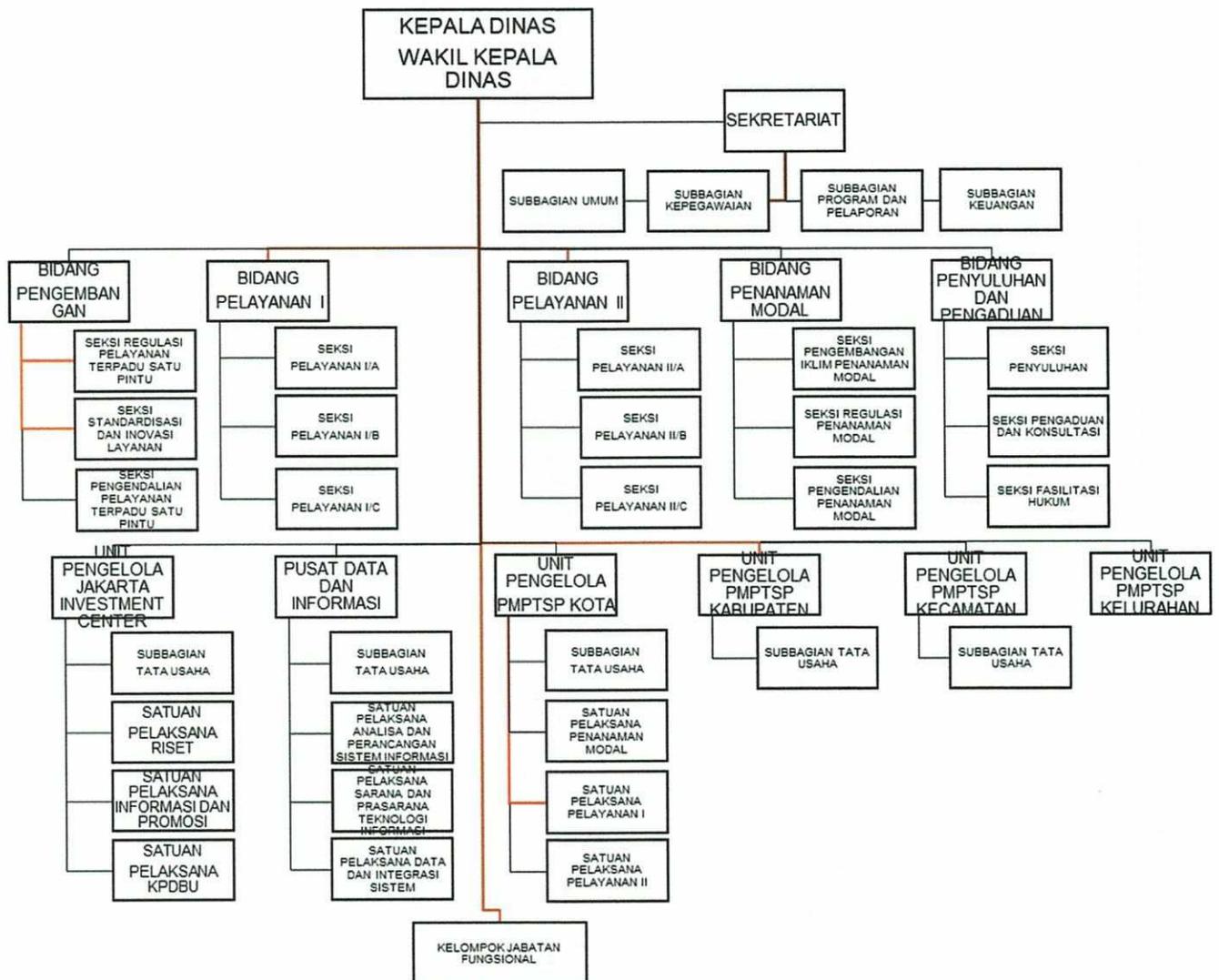
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
- d. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
- e. penyelenggaraan penanaman modal;
- f. penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan;

- g. penandatanganan dan penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- h. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- i. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- j. pengelolaan data dan sistem teknologi informasi Dinas;
- k. pelayanan penyuluhan, penyelesaian pengaduan/keluhan, masyarakat serta fasilitasi hukum atas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- l. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- m. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- n. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/ atau Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi dan tata kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebagai berikut.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Sumber : Pergub Provinsi DKI Jakarta No 160 Tahun 2019

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah PNS pada DPMPSTSP terhitung sampai dengan 31 Desember 2020 berjumlah 1.246 orang. Jumlah PNS tersebut masih jauh dari kata cukup untuk jumlah pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan. Oleh karena itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pegawai antara lain dengan penambahan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan meliputi Juru Ukur ISI, Penunjang Juru Ukur, Petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), Petugas Informasi dan Konsultasi (Call Center), Petugas Customer Relation, Arsitek Perizinan, Inspektur Bangunan, Petugas Site Office Manager, Petugas Community Manager, Pekerja Harian Lepas (PHL) dan Caraka dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Non PNS Menurut Pendidikan Di Lingkungan DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta

Jabatan	Jumlah
Juru Ukur	117
Penunjang Juru Ukur	137
Pengolah Data	96
Petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB)	200
Petugas Informasi dan Konsultasi (Call Center)	28
Petugas Customer Relation	300
Arsitek Perizinan	16
Inspektur Bangunan	14
Petugas Site Office Manager	1
Petugas Community Manager	1
Pekerja Harian Lepas (PHL)	380
Caraka	55
Total	1.345

Sumber: Subbag Kepegawaian DPMPSTSP

Secara keseluruhan jumlah sumber daya manusia PNS dan Non PNS di lingkungan DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta berjumlah 2.591 orang.





BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2017-2022 di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), pada hakekatnya didalam Renstra merupakan pernyataan komitmen jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja beserta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan DPMPTSP melalui perencanaan yang efektif dan terarah serta pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan

1. VISI

Visi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta adalah

“Solusi Investasi dan Perizinan di Jakarta”

2. MISI

Untuk menjabarkan visi tersebut, maka misi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta adalah:

- 1) Meningkatkan nilai investasi melalui promosi, penyempurnaan peraturan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui penciptaan inovasi layanan berbasis sistem teknologi informasi;
- 3) Mengelola pengaduan masyarakat dengan berbasis *quick response*;
- 4) Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur DPMPTSP sesuai kompetensi;
- 5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan handal.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2020 adalah :

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Periode Tahun 2020
 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran	Keterangan
1.	Meningkatkan investasi di DKI Jakarta	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi investasi (Triliun rupiah)	110	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (akan ada rencana perubahan target di RPJMD menjadi 75 T)
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
3	Meningkatkan Pelayanan Perijinan dan non Perijinan yang diselenggarakan secara online	Meningkatnya Pelayanan Perijinan dan non Perijinan yang diselenggarakan secara online	1. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	100%	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
			2. Indeks Kepuasan Layanan Kantor	4	Berdasarkan Renstra DPMPTSP
			3. Indeks Kepuasan Kendaraan Dinas Operasional	4	Berdasarkan Renstra DPMPTSP

Sumber: Renstra DPMPTSP 2017-2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Definisi operasional dari indikator dalam tujuan dan sasaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta adalah:

1) Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

3) Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Online

Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online adalah jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diselenggarakan secara online dibandingkan dengan seluruh jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan.

4) Indeks Kepuasan Layanan Kantor

Indeks kepuasan pelayanan kantor berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada monev. Indeks 1 = 0-25%, Indeks 2 = >25%-50%, Indeks 3 = >50%-75%, Indeks 4 = >75%-100%.

5) Indeks Kepuasan Kendaraan Dinas Operasional

Indeks kepuasan pelayanan KDO berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada monev. Indeks 1 = 0-25%, Indeks 2 = >25%-50%, Indeks 3 = >50%-75%, Indeks 4 = >75%-100%.

4. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja

suatu kegiatan. Indikator kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ditampilkan berikut ini :

Tabel 2.2 Matriks Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1.	Realisasi Investasi	Rp 55 T	Rp 93,10 T	Rp 100,20 T	Rp 107,8 T	Rp 115,90 T	Rp 124,50 T	Rp 541,50 T
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	80,00	83,00	86,00	88,00	88,50	88,50
3.	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	80,29%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Indeks Kepuasan Layanan Kantor	-	4	4	4	4	4	4
5.	Indeks Kepuasan Kendaraan Dinas Operasional	-	4	4	4	4	4	4

Sumber: RPJMD Tahun 2017-2022

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan target kinerja tahun kedua dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta, yang diselaraskan dengan Renstra DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penetapan kinerja tersebut Kepala DPMPTSP dan Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berjanji akan mewujudkan target kinerja berupa :

Tabel 2.4 Matriks Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta Target DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020
1	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi nilai investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta.	110 Triliun
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	Indeks kepuasan masyarakat	88,5
3	Meningkatnya Pelayanan Perijinan dan non Perijinan yang diselenggarakan secara online	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	100%

Sumber : Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan target tersebut DPMPTSP menargetkan penyerapan anggaran sebesar:

Tabel 2.5 Target Penyerapan Anggaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Penanaman Modal	Rp 3.172.290.450	APBD
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 115.542.755.267	APBD
3	Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal	Rp 17.353.513.099	APBD

4	Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal	Rp	1.396.498.400	APBD
	TOTAL	Rp	137.465.057.216	APBD

Sumber : DPA DPMPTSP 2020 (diolah)



S.E.T.I.A

SOLUSI, EMPATI, TEGAS, INOVASI, ANDAL

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100	:	Sangat Berhasil
70 s/d <85	:	Berhasil
55 s/d < 70	:	Cukup Berhasil
0 s/d < 55	:	Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. TARGET DAN REALISASI KINERJA

Sampai dengan Tahun 2020, realisasi kinerja DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perkin	Realisasi	Capaian		
				Persen	Ordinal	Predikat
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Realisasi Nilai Investasi	110 Triliun	95 Triliun	86,36	86	Berhasil
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	89,99	101,68	100	Sangat Berhasil
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	100	100	100	100	Sangat Berhasil
	Rata-rata capaian kinerja			96,01%	95	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja DPMPPTSP bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal kedua target indikator kinerja memperoleh capaian berhasil dengan rata-rata nilai capaian kinerja DPMPPTSP sebesar 95% dapat dikategorikan berhasil.

2. REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DIBANDINGKAN CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Jumlah realisasi mengalami kenaikan dari tahun 2017 dari Rp.108,6 Triliun menjadi Rp.114,2 Triliun pada Tahun 2018 atau mengalami kenaikan sebesar 5,1% begitu pula pada tahun berikutnya terjadi kenaikan dalam jumlah realisasi investasi dari Rp 114,2 Triliun tahun 2018 menjadi Rp. 123,9 Triliun pada tahun 2019 atau mengalami kenaikan sebesar 8,5%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan dari Rp. 123,9 Triliun menjadi Rp. 95% Triliun pada Tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar 23,3%. Untuk indikator tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2017 blm menggunakan ukuran indeks kepuasan masyarakat, Pada tahun selanjutnya indeks kepuasan masyarakat mengalami penurunan kinerja dari 85,55 pada tahun 2018 menjadi 83,03 pada tahun 2019 atau menurun sebesar 3%. Namun mengalami peningkatan pada tahun 2019 dari 83,03 menjadi 89,99 pada tahun 2020 atau naik sebesar 8,4%.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1	Realisasi nilai investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta	108,6 Triliun	114,2 Triliun	123,9 Triliun	95 Triliun
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	85,55	83,03	89,99
3	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	99%	100%	100%	100%

3. REALISASI KINERJA DAN TARGET TAHUN 2020

Indikator kinerja jumlah realisasi investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta ditargetkan pada tahun 2020 dapat mencapai Rp 110 Triliun dan pada tahun 2020 telah tercapai Rp 95 Triliun atau sebesar 86,36%. Indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat

ditargetkan pada tahun 2020 adalah 88,5 dan sampai tahun 2020 telah tercapai 89,99 atau sebesar 101,68%.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPSTP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Dengan Target Tahunan Provinsi DKI Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Realisasi nilai investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta	110 Triliun	95 Triliun	86,36%
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	89,99	101,68%
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	100%	100%	100%

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN, TANTANGAN DAN PENINGKATAN KINERJA

a. Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI Jakarta

Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI Jakarta menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja jumlah realisasi investasi pada tahun 2020 yakni sebesar Rp. 95 Triliun dari target sebesar 110 Triliun atau tercapai sebesar 86,36% dan masuk dalam kategori berhasil. Hal ini disebabkan membaiknya iklim penanaman modal di Provinsi DKI

Jakarta sehingga memberikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Jakarta. Perbaikan infrastruktur dan banyaknya program pemerintah di bidang pembangunan juga turut meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Jakarta. Dan jika dibandingkan dengan target tahunan maka capaian indikator ini telah tercapai 88%.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja organisasi adalah :

- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Penanaman Modal dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang antara lain digunakan untuk harmonisasi peraturan, pelaksanaan promosi dan pengendalian penanaman modal.
- Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non izin secara online,
- Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu gedung pelayanan,
- Perbaikan dalam kebijakan *Ease Of Doing Business* (EODB) yang mempengaruhi investor dalam menginvestasikan dananya di Jakarta. Dalam rangka mendukung peningkatan peringkat EODB atau Kemudahan Berusaha di DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha / *Ease Of Doing Business* (EODB) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, yang mana di dalamnya terdapat keputusan bahwa meniadakan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dalam persyaratan perizinan dan non perizinan di DPMPSTSP DKI Jakarta dan selain itu untuk Penerbitan SIUP dan TDP dilakukan secara online dengan waktu penyelesaian 0,5 hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

- Dikembangkannya *Jakarta Investment Center* (JIC) untuk memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan segala informasi tentang investasi di Jakarta.
- Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh para investor di DKI Jakarta.
- Ditingkatkannya UMKM dengan melakukan kemudahan melalui relaksasi pemberian IUMK.
- Dikembangkannya pengintegrasian Sistem JakEvo-AJIB untuk mengatasi perizinan yang tidak dapat dilakukan secara online 100% karena beberapa hal yang harus tetap dijalani secara manual.

Tantangan dalam mencapai target kinerja organisasi adalah :

- Adanya pandemi *COVID-19* yang belum berakhir.
- Harmonisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah yang belum tercapai.
- Masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya menerima informasi perubahan kebijakan yang telah dilakukan Pemda DKI Jakarta terkait *ease of doing business* (EODB).
- Masih terbatasnya informasi proyek-proyek investasi yang akan dipromosikan.

Tindak lanjut tantangan :

- Melakukan pengkajian dan penelaahan atas adanya kebijakan yang baru agar dapat diimplementasikan.
- Menyederhanakan regulasi investasi dan atau penanaman modal serta melakukan sosialisasi regulasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
- Meningkatkan aktivitas promosi melalui Branding (awareness campaign, penguatan citra investasi DKI) dan Business Forum.
- Mengoptimalkan fungsi JIC dalam rangka memperoleh informasi terkait proyek-proyek investasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
- Harmonisasi regulasi Pusat dan Daerah.

- Penyusunan kebijakan dan disinsentif.
- Pengembangan kebijakan iklim penanaman modal sebagai agenda pemulihan ekonomi.
- Optimalisasi pengawasan dan fasilitasi penanaman modal.
- *Self Awareness* terhadap kebijakan EODB.
- Optimalisasi promosi investasi mewujudkan Jakarta sebagai destinasi investasi.
- Fasilitasi KPBU sebagai salah satu agenda *Creative Financing*

b. Indeks Tingkat kepuasan masyarakat

Indeks tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta karena merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja, dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Indeks tingkat kepuasan masyarakat diukur dengan cara melakukan Survey Kepuasan Masyarakat. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta pada pusat-pusat layanan baik dari tingkat Dinas, Kep. Seribu, Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan. Total unit layanan yang dievaluasi adalah sebanyak 310 layanan, yang terdiri dari 1 Dinas, 5 unit kota/ 1 Kab, 42 layanan kecamatan dan 261 unit kelurahan. Survey dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian wawancara langsung dengan masyarakat yang telah mendapatkan layanan secara paripurna dengan menggunakan kuesioner terstruktur (*Structured Questionnaire*).

Untuk perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 dan sekarang di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14

Tahun 2017, dimana terdapat 9 pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat, dengan unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan meliputi:

1. Kemudahan Persyaratan Pelayanan,
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan,
3. Ketepatan Waktu Penyelesaian,
4. Kesesuaian Biaya,
5. Kesesuaian Peraturan (Hasil Pelayanan dengan Ketentuan yang ditetapkan),
6. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan,
7. Sikap SETIA
8. Kualitas sarana dan prasarana dan
9. Kecukupan / keefektifan sarana informasi/pengaduan

Berdasarkan jawaban yang diterima dari responden tersebut kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil perhitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan Tabel Nilai persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, sehingga bisa diketahui Mutu Pelayanan dan Kinerjanya.

Tabel 3.4 Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 - 3,53	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,53 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Untuk mengetahui gambaran hasil penelitian maka perlu dilakukan analisa hasil survei dengan mengelompokkan kedalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu tingkat Kota/Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan kemudian untuk Analisa data Provinsi, ditambahkan

data Provinsi. Dengan demikian maka akan diketahui karakteristik masing-masing tingkatan, sehingga memudahkan para pengelola layanan mengetahui kekuatan dan kelemahan terhadap layanan yang diberikan kepada publik. Kemudian dari keempat tingkatan tersebut dihitung juga nilai IKM secara keseluruhan. Nilai IKM ini selanjutnya menjadi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Provinsi DKI.

Kemudian untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan DPMPSTP secara keseluruhan, maka dilakukan analisa *Top 2 Boxes*, yaitu menghitung jumlah responden yang menyatakan puas dan sangat puas pada pertanyaan "J: Secara keseluruhan, seberapa puas Anda dengan Layanan Terpadu Satu Pintu yang diberikan oleh DPMPSTP DKI?" Kemudian jumlah keduanya dibagi dengan jumlah responden secara total, sebagai berikut:

$$Top\ 2\ Boxes = \frac{\sum(Puas + Sangat\ Puas)}{Jumlah\ Responden}$$

Pembahasan hasil penelitian selanjutnya akan di kelompokkan dalam 4 (empat) bagian pembahasan, yaitu:

1. Tingkat Kotamadya,
2. Tingkat Kecamatan,
3. Tingkat Kelurahan,
4. Tingkat Provinsi dan
5. Secara Keseluruhan.

Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 89,99 dari target sebesar 88,5 atau tercapai sebesar 101,68% dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan sebesar 8,4% yakni dari 83,03 pada tahun 2019 menjadi 89,99 pada tahun 2020. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian indikator ini telah tercapai 101,68%.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja organisasi adalah :

- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Biro ORB dan Kominfo memberikan dukungan penuh kepada DPMPTSP terkait pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- Sarana Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sudah baik seperti kuesioner SKM sudah diintegrasikan dengan Sistem Jakevo, sehingga kuesioner secara otomatis muncul sebelum responden *mendownload* output perizinan/non perizinan.
- Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia DPMPTSP untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- Tersedianya sarana prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan.
- DPMPTSP berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui harmonisasi peraturan dan penyederhanaan persyaratan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur dan biaya dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui portal pelayanan.jakarta.go.id
- Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik sebagai one-stop service 328 perizinan dan pelayanan terpadu kerjasama pelayanan pemerintah pusat dan daerah.
- Tersedianya pelayanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yaitu layanan antar jemput berkas izin bagi pemohon yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung mengurus izin ke loket, semua jenis perizinan dan non perizinan dapat dilakukan melalui AJIB dengan syarat pemohon harus sebagai pimpinan/karyawan perusahaan tersebut dan bukan pihak ketiga atau calo, selain itu dikembangkan pelayanan AJIB dengan Mobile Service Unit (MSU)

sebanyak 3 unit yang dapat juga melayani perizinan dan non perizinan di lokasi tertentu. Jumlah jasa pengurusan melalui AJIB pada tahun 2020 secara keseluruhan 497.440 layanan.

- Tersedianya layanan Call Center DPMPTSP yang dapat diakses melalui sambungan telepon 021-1500164 untuk melayani informasi pengurusan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan masyarakat dan pemesanan layanan AJIB. Selama tahun 2020 Call Center DPMPTSP telah melayani sebanyak 137.513 layanan.
- Adanya pelayanan IMB 3.0 yakni pengurusan IMB dengan waktu 3 jam untuk luas tanah >200 m², dengan syarat ketentuan berlaku.
- Terobosan serta inovasi untuk kemudahan layanan perizinan dan non perizinan, antara lain :
 - a. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan mendukung Ketetapan Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) maka telah dilakukan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atas permohonan perizinan dan/atau non perizinan dengan melakukan pengecekan pada basis data yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) melalui integrasi data dengan sistem yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - b. Sesuai dengan INKADIS No.21 Tahun 2018 tentang penggunaan Sistem Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan pada aplikasi pelaporan. Pelaporan melalui sistem web internal meliputi pelaporan PTSP Manual, PTSP Online, Dukcapil/PMI, legalisir/pencabutan/mutasi dan konsultasi.
 - c. Untuk memperbaiki sistem pelaporan bulanan dari masing-masing service point, maka telah dibuatkan sebuah sistem pada *website internalpelayanan.jakarta.go.id* yang mana dari masing-masing service point melakukan rekap pelaporan pada sistem tersebut paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

- d. Adanya Aplikasi e- KRK untuk pengurusan Ketetapan Rencana Kota (KRK) secara real time online dengan penjadwalan survey online dan penyatuan database terintegrasi di Sistem Jakarta Satu.
- e. Pencantuman QR Code pada papan IMB yang terintegrasi dengan sistem JakEvo, yang memberikan informasi lengkap soal status bangunan tersebut agar mempermudah dinas terkait dalam melakukan pengawasan terhadap izin IMB dengan melakukan scanning terhadap QR Code, inovasi ini dilakukan penerapan pada UP PTSP Kecamatan Jatinegara.
- f. Layanan Platinum IMB online untuk rumah tinggal membantu warga yang gagap teknologi dalam pengurusan IMB yang dilakukan dengan jemput bola dengan membawa mesin EDC sehingga pemohon bisa langsung membayar retribusi sesuai aturan. Layanan ini diterapkan pada UP PTSP Kecamatan Kalideres.
- g. Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Perizinan atau Masdarin adalah kelompok sadar perizinan di masyarakat yang memahami dan mengerti tentang pelayanan perizinan maupun yang sudah pernah melakukan permohonan perizinan online ataupun yang nantinya akan mendapatkan pengetahuan serta bimbingan dari petugas guna menyebarkan informasi pelayanan perizinan mulai dari tingkat RT/RW sampai kecamatan sehingga tidak ada lagi perizinan yang ditolak atau dikembalikan permohonannya.
- h. Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Fasilitas Kesehatan dengan e-survei (Si Unik) di UP PTSP Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Output dari sistem ini adalah Berita Acara Survey Secara Elektronik (e-survei) untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan sarana kesehatan yang sebelumnya memerlukan waktu lebih dari 14 hari kerja menjadi hanya 1 hari kerja.
- i. Pembuatan Aplikasi S-Mobile sebagai percepatan proses peninjauan lapangan pada permohonan SIP Dokter Umum

- Praktik Perorangan di UP PTSP Kecamatan Makasar. S-Mobile merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan web mobile untuk mempermudah petugas dalam proses peninjauan lapangan dan pembuatan BAPL dengan standar lengkap. Mempercepat proses penerbitan izin SIP Dokter Praktik Perorangan dari proses 7 hari kerja menjadi 3 hari kerja.
- j. Percepatan penyampaian laporan output perizinan bidang kesehatan berbasis elektronik (Silabik) di UP PTSP Kecamatan Taman Sari. Sistem pelaporan kesehatan berbasis elektronik mempercepat Dinas Teknis terkait (Suku Dinas Kesehatan) untuk mendapatkan data perizinan bidang kesehatan yang diterbitkan oleh DPMPTSP sehingga memudahkan untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Pengawasan Pengendalian (BINWASDAL)
 - k. Pengintegrasian izin terpadu pelayanan perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata khususnya bagi peserta PKT (Pelatihan Kewirausahaan Terpadu) yang sudah dilatih SKPD terkait dan sudah mendapatkan izin UKM agar mendapatkan izin lanjutan TDUP agar pelaku usaha rintisan PKT ini bisa cepat naik kelas sehingga menjadi solusi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan warga DKI Jakarta.
 - l. Kemudahan mengajukan IUMK melalui jakevo.jakarta.go.id
 - m. Dalam rangka mendorong aktivitas perekonomian dan pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta akibat wabah *Covid-19* maka dilakukan Percepatan dan Relaksasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan sikap responsif, proaktif dengan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan, keamanan dan keselamatan.
 - n. Penyelenggaraan Pelayanan Izin Penggunaan Tanah Makam secara elektronik melalui web jakevo.jakarta.go.id dalam rangka efektivitas pelayanan Izin Penggunaan Tanah Makam.
 - o. Dalam rangka pelaksanaan Pergub 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta maka diterbitkan Tata Cara Penerbitan

- Surat Izin Keluar/Masuk dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.
- p. Percepatan pelayanan Izin Pembuangan Air Limbah dilaksanakan dengan menyederhanakan prosedur dan persyaratan.
 - q. Dalam rangka mendorong aktivitas perekonomian pada masa pandemi *Covid-19* maka perlu dilakukan Pelaksanaan Relaksasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
 - r. Penyelenggaraan pelayanan perizinan Izin Usaha Toko Swalayan dengan penyesuaian SLF dalam rangka pemulihan ekonomi akibat *Covid-19*.
 - s. Dalam rangka mendukung ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk menanggulangi dampak status tanggap darurat bencana wabah *Covid-19* di Provinsi DKI Jakarta maka dilakukan Perpanjangan Masa Berlaku Dokumen Izin Tertentu di Bidang Kesehatan terkait penyebaran *Covid-19*.
 - t. Ujicoba Pelayanan Perizinan Bangunan Terintegrasi pada Bangunan Rumah Tinggal Sub Standar Eksisting melalui Jakevo 4.0
 - u. Pembuatan kanal Sistem Informasi Kotak Aspirasi (SIKOPI) pada web internalpelayanan.jakarta.go.id sebagai sarana komunikasi pengumpulan fakta-fakta lapangan yang diharapkan dapat mendekatkan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan implementasi pelaksanaan layanan tersebut di lapangan. Selain itu, melalui hal tersebut diharapkan juga agar ditemukannya permasalahan-pemmasalahan baru yang tersembunyi dari perspektif manajemen atau pejabat yang berwenang, sehingga dapat menghasilkan capaian yang maksimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat berdasarkan *evidence based*.

Tantangan dalam mencapai target kinerja organisasi adalah :

- Adanya pandemi *Covid-19* yang belum berakhir.

- Adanya perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan dari pemerintah pusat yang membutuhkan waktu penyesuaian.
- Masih adanya anggapan bahwa layanan perizinan dan non perizinan sulit dan rumit.
- Masih terdapat rekomendasi dari SKPD teknis terhadap perizinan dan non perizinan yang melebihi batas waktu
- Kebutuhan SDM Teknis masih ada kekurangan.

Tindak lanjut tantangan :

- Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP terkait diagendakan secara terjadwal serta melibatkan stakeholder terkait.
- Pembuatan program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan penyajian fakta berbasis data bahwa DPMPTSP merupakan tempat pengurusan izin cepat, mudah, terjangkau, tidak ada pungli.
- Perlu dikembangkan aplikasi pemberian rekomendasi secara online (e-rekomtek)
- Dilakukan perekrutan Tenaga Ahli bidang teknis yang memenuhi standar.

c. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online

Layanan perizinan dan non perizinan online dikembangkan untuk memastikan masyarakat memperoleh jaminan pelayanan sesuai dengan SOP, yakni jaminan prosedur, syarat, waktu dan biaya. Selain itu dengan adanya layanan online diharapkan mampu mengurangi jumlah calo yang merugikan pemohon.

Capaian persentase layanan perizinan dan non perizinan secara online tahun 2020 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2020 maupun target jangka menengah maka indikator ini telah tercapai 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator ini adalah:

- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pengembangan layanan perizinan dan non perizinan secara online.
- Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh SDM DPMPTSP untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- Dukungan dari SKPD teknis terkait yakni Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov. DKI Jakarta dalam rangka pengembangan sistem *online* berupa pemberian rekomendasi.
- Tersedianya SOP yang lengkap terkait perizinan dan non perizinan sebagai dasar pembuatan bisnis proses pengembangan sistem *online*.

Tantangan pencapaian indikator

- Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP untuk terus mengembangkan sistem online layanan perizinan dan perizinan yang lebih cepat dan akomodatif terhadap kebutuhan pemohon.

Tindaklanjut Tantangan

- Bidang pengembangan serta Bidang Penanaman Modal akan memberikan updating informasi mengenai perubahan SOP sehingga dapat langsung diakomodir dalam sistem online.

5. ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Jumlah PNS pada DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terhitung sampai dengan 31 Desember 2018 berjumlah 1.246 pegawai dan jumlah pegawai non PNS sebanyak 1.345 sehingga jumlah total pegawai DPMPTSP sebanyak 2.591 pegawai, sedangkan menurut analisa beban kerja kebutuhan pegawai dibutuhkan PNS sebanyak

3.047 pegawai menurut Analisa jabatan(Anjab) atau Analisa Beban Kerja (ABK).

Tabel 3.5 Perbandingan Jumlah Pegawai dengan Capaian Kinerja

Jumlah Pegawai	Jumlah Anjab/ABK	Persen	Capaian Kinerja
2.591	3.047	85,03 %	94%

Melihat tabel tersebut diatas bahwa meskipun jumlah pegawai masih lebih kecil dari kebutuhan ANJAB/ABK yakni sebesar 85,03%, namun capaian kinerja secara keseluruhan rata-rata tercapai 94%. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP dapat mengoptimalkan sumber daya manusia di Lingkungan DPMPTSP.

Berdasarkan analisis sumber daya diatas, terutama dari segi sumber daya manusianya, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan SDM masih diperlukan untuk mendorong optimalisasi target kinerja. Dan kebutuhan tenaga PJLP sebagai pendukung capaian kinerja DPMPTSP sangat dibutuhkan.

b. Analisa Sumber Daya Anggaran

Target belanja DPMPTSP pada tahun Rp.529.794.412.438 dan realisasi sebesar Rp. 449.344.352.307 atau sebesar 84,81 %.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	%
Realisasi nilai investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta	86,36%	72,13%	119,7%
Indeks Kepuasan Masyarakat	101,68%	97,84%	103,9%
Rata-rata	94,02%	84,98%	111,8%

Dibandingkan dengan kinerja yang dicapai pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar 84,98% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 94,02% menunjukkan adanya efektifitas penggunaan dana.

Berdasarkan analisis sumber daya diatas, terutama dari segi penyerapan anggarannya, maka dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 DPMPSTSP masih membutuhkan tambahan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Kebutuhan anggaran tersebut diperlukan untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mencapai target dalam Renstra DPMPSTSP Tahun 2017-2022 dan untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas

6. ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja DPMPSTSP sebanyak 4 program dengan 41 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Penanaman Modal

Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.172.290.450,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.288.424.636,- Hasil kegiatan dari program ini antara lain:

- Diadakannya JIC Talks secara virtual dengan tema “ DKI Jakarta Menuju Ketahanan Pangan” Pada tanggal 24 September 2020.
- Diadakannya JIC Talks secara virtual dengan tema :” Investment Research Insight” yang menjelaskan lebih mendalam mengenai riset pemasaran pada tanggal 27 Oktober 2020 dan 2 November 2020
- Pengadaan Webinar ‘penanganan Covid-19 di DKI Jakarta pada tanggal 24 November 2020 dengan Tema ‘Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Sosial dan Ekonomi’ yang disiarkan

langsung melalui Zoom Meetings dan Channel Youtube Layanan Jakarta.

- Manerima kegiatan misi penanaman modal, yaitu:
 1. Kunjungan dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat
 2. Kunjungan dari DPMPTSP Provinsi Jambi.
 3. Kunjungan dari Delegasi Australian Embassy
 4. Kunjungan dari PT. Garuda Visi Nusantara dan Beihang UAS Technology Co.Ltd
 5. Fasilitasi Xtramile Solutions sebagai follow up Jakarta Business Forum Sydney 2019
 6. Fasilitasi Osaka Gas Project sebagai follow up Indonesia Japan Business Forum 2019
 7. Fasilitasi Volocopter GmbH untuk proyek Urban Air Mobility
 8. Fasilitasi PT. Seribu Pesona Indonesia untuk proyek pengembangan Kawasan pariwisata dan bisnis di Kepulauan Seribu
 9. Fasilitasi Revitalisasi Taman Margasatwa Ragunan
 10. Fasilitasi Macquarie Capital dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk proyek Intermediate Treatment Facility
 11. Fasilitasi Proyek KPDBU JSS Zona 8
 12. Fasilitasi Proyek KPDBU LRT Jakarta
 13. Fasilitasi Rencana Proyek KPDBU SPAM Karian
 14. Fasilitasi Rencana Proyek KPDBU SPAM Jatiluhur 1 sistem hilir
 15. Fasilitasi KPDBU Rusunawa Daan Mogot
 16. Fasilitasi Rencana Proyek KPDBU Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
- Jumlah peraturan pendukung perizinan dan non perizinan yang telah disusun 160 Keputusan Kepala Dinas, 3 Instruksi Kepala Dinas, 6 Pengumuman dan 41 Surat Edaran Kepala Dinas.
- Jumlah LKPM yang direview 12.197 perusahaan.

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 115.542.755.267,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 113.047.351.889,- Hasil kegiatan dari program ini antara lain:

- Meraih Sertifikat ISO 9001:2015 pada Bidang Pelayanan I yaitu dalam Sistem Manajemen Mutu.
- Diselenggarakannya webinar Pelatihan Kewirausahaan 2020 UMKM Maju Berdaya di Era Pandemi COVID-19 dengan tema 'Cara Mudah Mendapatkan Izin Usaha' pada tanggal 17 November 2020.
- Relaksasi pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
- Telah diterbitkannya 111.142 izin usaha mikro dan kecil (IUMK)
- Direkrutnya 300 Customer Relation Officer (CRO) sebagai front office DPMPSTP.
- Direkrutnya 200 pegawai Antar Jemput Ijin Bermotor (AJIB) yang melayani sebanyak 497.440 layanan.
- Direkrutnya 28 orang pegawai Call Center dan melayani sebanyak 137.513 layanan.
- Direkrutnya 117 orang Juru Ukur, 137 orang Penunjang Juru Ukur dan 96 orang Pengolah Data, 16 Arsitek Perizinan dan 14 Inspektur Bangunan.
- Bidang Penyuluhan dan Pengaduan pada Tahun 2020 memberikan pelayanan informasi masyarakat sebanyak 308.058 layanan, terdiri dari loket konsultasi/penyuluhan 13.890 layanan, melalui surat dan media sosial sebanyak 7.369 layanan, email sebanyak 2.018 layanan, Call Center sebanyak 137.513 layanan dan melalui kunjungan *best practice* (baik secara langsung maupun melalui bantuan teknologi informasi) diikuti 649 peserta.
- Perhitungan AVE (Advertising Value Equivalency) yaitu efektifitas pencapaian pelaksanaan fungsi kehumasan (Public Relation) yang diukur dengan memberi perkiraan nilai moneter sebuah kampanye public relation melalui interaksi media komunikasi baik offline maupun online dengan mengonversikan terpaan pesan

komunikasi ke dalam nilai moneter pemasangan iklan. Berdasarkan perhitungan total AVE DPMPTSP sepanjang tahun 2020 sebesar 23,8 Miliar.

- Pelaksanaan kegiatan komunikasi masyarakat terpadu dilakukan dengan daring imbas dari pandemi *Covid-19* sehingga kegiatan yang dilakukan melalui ruang publik ditiadakan sementara waktu. Namun, jumlah publikasi media televisi meningkat sebesar 27%. DPMPTSP diberitakan 1106 kali di berbagai media baik TV, Radio, media cetak maupun online, media sosial sebanyak 9.080.833 impression. Telah dilaksanakan kegiatan komunikasi masyarakat terpadu bekerjasama dengan Kementerian Kominfo melalui program Layanan Jakarta ON TV telah tayang sebanyak 23 episode setiap hari Selasa pukul 18.30 WIB dan siaran ulang pada pukul 07.00 WIB di channel GPRTV (C Band Satelit Telkom 4 Freq 3766 pMHz) atau melalui Live Streaming di website GPRTV.ID. Video yang diproduksi sebanyak 203 video motion grafis. Desain grafis yang diproduksi sebanyak 103 design. Panduan atau pedoman terkait pelaksanaan komunikasi masyarakat terpadu sebanyak 9 panduan/pedoman dengan topik diantaranya panduan SIKM, panduan penyelenggaraan event hybrid (seremonial virtual), petunjuk teknis untuk kelengkapan ISO 9001:2015, 2 Strategi komunikasi untuk program unggulan DPMPTSP di Tahun 2020, 2 protokol krisis, kalender komunikasi setiap triwulan, dan laporan pelaksanaannya setiap bulan sesuai Instruksi Sekretaris Daerah No.76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi DKI Jakarta. Media produksi melibatkan 43 publik figur yang menyatakan dukungan/testimoni mengenai pelayanan publik yang prima di Jakarta.
- Publikasi berita positif DPMPTSP dengan rasio berita positif sebesar 8,9.
- Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan dengan hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 89,99.

- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi layanan dengan jumlah yang sudah di monev sebanyak 269 service point.
- Tersedianya sistem informasi pendukung layanan investasi serta perizinan dan non perizinan yakni Jakevo, Jakarta Virtual Consultan for Bussines Prosses (JVC4b) dengan OSS (*Online Single Submission*), Jakarta Investment Center.
- Jumlah pelaksanaan sidang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebanyak 29 kali.
- Bidang Aktivitas Usaha telah berhasil mendapatkan sertifikat The International Organization For Standardization (ISO).SNI ISO 9001: 2015

c. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal

Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 17.353.513.099,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.051.172.296,- Hasil kegiatan dari program ini antara lain:

- Beroperasinya sarana dan prasana kantor sesuai sasaran fungsionalnya.
- Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor pendukung layanan perizinan dan non perizinan antara lain alat tulis kantor, alat rumah tangga kantor, kelengkapan komputer seperti (flash disk, mouse, keyboard, hard disk, speaker dll) dan alat kerja lainnya untuk unit layanan di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi.

d. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal

Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.372.592.440,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.846.183.888,- Hasil kegiatan dari program yakni terpelihara dan beroperasinya Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 336 motor dan 28 unit mobil.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2020 DPMPSTSP dialokasikan anggaran sebesar Rp.529.794.412.438,- Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 392.329.355.222,- dengan penyerapan sebesar Rp. 317.113.681.039 atau 80,83% dan Belanja Langsung sebesar Rp.137.465.057.216,- dengan penyerapan sebesar Rp. 132.230.671.268,- atau 96,19 %, yang dijabarkan ke dalam 4 Program dan 36 Kegiatan. Dengan penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG		392.329.355.222	317.113.681.039	80,83%
	Belanja Pegawai	392.329.355.222	317.113.681.039	80,83%
BELANJA LANGSUNG		137.465.057.216	132.230.671.268	96,19%
Program Peningkatan Penanaman Modal				
1	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	71.940.000	71.940.000	100%
2	Pelaksanaan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.096.227.330	1.083.886.000	98,87%
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	21.142.180	20.800.000	98,38%
4	Persiapan dan Penyiapan Proyek Infrastruktur Strategis Daerah Yang Akan Dikerjasamakan Dengan Badan Usaha	498.400.000	220.410.000	44,22%
5	Penyelenggaraan Jakarta Investment Center	909.080.940	323.488.636	35,58%
6	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta	575.500.000	567.900.000	98,67%

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1	Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	757.187.704	543.300.000	71,75%
2	Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	12.666.080.246	12.169.272.400	96,08%
3	Pengelolaan Call Center	6.105.218.852	6.079.887.777	99,59%
4	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)	19.224.433.635	19.074.407.636	99,22%
5	Penyediaan Jasa Petugas Customer Relation Officer	27.962.812.561	27.707.897.293	99,09%
6	Penyediaan Jasa dan Peralatan Pendukung Penelitian Teknis	34.248.981.811	33.529.988.069	97,90%
7	Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	302.817.700	224.770.000	74,23%
8	Pengelolaan Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	638.800.000	570.600.000	93,35%
9	Penyediaan Jaringan Internet Pendukung Untuk Peningkatan Pelayanan Publik	4.365.689.864	4.220.707.300	96,68%
10	Pelaksanaan Komunikasi Masyarakat Secara Terpadu	2.629.125.544	2.376.979.640	90,41%
11	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	453.500.000	389.900.000	87,96%
12	Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik	6.188.107.350	6.156.393.464	99,49%
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal				
1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	84.420.088	78.689.050	93,21%
2	Penyediaan alat tulis kantor	850.309.000	760.584.000	89,45%
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	63.910.500	57.403.500	89,82%

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
4	Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka	3.232.253.421	3.204.731.242	99,15%
5	Penyediaan makanan dan minuman	110.935.000	79.405.100	71,58%
6	Penyediaan sewa mesin foto copy	1.620.000.000	1.281.561.600	69,47%
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.623.091.528	1.481.830.000	91,30%
8	Penyediaan Jasa Telepon,Air, Listrik dan Internet	2.062.428.226	1.853.667.270	89,88%
9	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor	1.983.929.750	1.857.647.730	93,63%
10	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	1.951.095.538	1.921.450.724	98,48%
11	Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Lift	636.436.400	598.917.000	94,10%
12	Penyediaan Jasa Pembuangan Sampah	24.000.000	24.000.000	100%
13	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	25.314.300	23.705.154	93,64%
14	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan AC ME dan Genset Kantor	907.131.825	732.605.993	80,76%
15	Pemeliharaan Gedung Kantor	121.384.533	66.371.890	54,68%
16	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	2.056.872.990	2.036.299.473	99,00%
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal				
1	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	1.065.669.400	500.158.127	46,93%
2	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	76.252.700	75.580.900	99,30%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	254.576.300	254.393.700	99,93%
	TOTAL	529.794.412.438	449.344.352.307	84,81 %

Sumber:sistem moneyv bappeda

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 penyerapan secara total anggaran tahun 2020 menunjukkan penurunan dikarenakan kondisi ekonomi global akibat pandemi COVID-19, yakni menurun dari 91,72% menjadi 84,81%. Jika melihat kinerja penyerapan Belanja Langsung maka kinerja penyerapannya mengalami peningkatan, yakni dari 83,71% menjadi 96,19%, peningkatan ini dikarenakan adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan jajaran SDM di Dinas PM dan PTSP untuk terus meningkatkan kinerjanya serta adanya monev anggaran yang dilaksanakan secara rutin dan intensif untuk mendorong peningkatan realisasi dan adanya upaya antisipasi terhadap penyerapan anggaran yang mengalami hambatan. Sedangkan untuk kinerja penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung terdapat penurunan, yakni dari 95,49% menjadi 80,83%, hal ini disebabkan karena terdapat refocusing anggaran belanja pegawai akibat pandemi covid-19.

Tabel.3.8 Tabel Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tahun	Anggaran			Penyerapan		
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total
2019	543.259.791.000	256.085.712.571	799.345.503.571	95,49%	83,71%	91,72%
2020	392.329.355.222	137.465.057.216	529.794.412.438	96,19%	80,83%	84,81%

Sumber: sistem monev bappeda

C. PENGHARGAAN

Berikut disampaikan penghargaan yang diterima DPMPTSP tahun 2020:

1. Penghargaan Platinum Awards (Juara Umum) PRIA 2020 Kategori Pemerintah Provinsi
2. Pemenang PRIA 2020 Kategori Pemerintah Provinsi Terpopuler di Media
3. Best Presenter PRIA 2020 Kategori Pemerintah Provinsi- Rinaldi S.I Kom, M.Si- Kepala Seksi Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
4. Departemen PR- Kinerja Bidang Penyuluhan dan Pengaduan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
5. Media Sosial DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta @layananjakarta
6. Video Profil DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berjudul Jakarta Investment Center

7. Pra Krisis DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta
8. Program Government PR – DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta, Urus Izin Sendiri Itu Mudah
9. Program Digital PR-DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta, Mini seri di- AJIBin Aja
10. Penghargaan Kategori “Pilar pemerintah sebagai perangkat daerah yang
11. memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah DKI Jakarta dari International Council For Small Business (ICSB) Indonesia.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Terdapat tiga indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 serta program prioritas Pemerintah provinsi DKI Jakarta lainnya. Adapun pencapaian kedua indikator tersebut secara keseluruhan mencapai 94,02 % atau masuk dalam kategori berhasil. Upaya koordinasi akan terus ditingkatkan dengan *stakeholder* terkait secara lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai melibatkan segenap instansi daerah dan pusat dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil, serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh pihak terkait dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan pengelolaan kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang pada akhirnya dapat mewujudkan Visi DPMPTSP untuk menjadi "Solusi Investasi dan Perizinan di Jakarta".

Lampiran

- **PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP**
- **DOKUMENTASI PENGHARGAAN**
- **DOKUMENTASI LAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK**
- **DOKUMENTASI LAYANAN AJIB**
- **DOKUMENTASI LIPUTAN LAYANAN DPMPTSP**

PERJANJIAN KINERJA DPMPSTP



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BENNI AGUSCANDRA

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

Jabatan : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2020

PIHAK KEDUA,

Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

BENNI AGUSCANDRA
NIP 196908081997031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi nilai investasi	110 Triliun Rupiah
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	Indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	88.5
3	Meningkatnya Pelayanan Perijinan dan non Perijinan yang diselenggarakan secara online	Persentase layanan perizinan dan non perizinan secara online	100%
4	Tenwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal	2.272.817.085	APBD Provinsi DKI Jakarta
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal	70.873.597.988	APBD Provinsi DKI Jakarta
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	126.412.372.242	APBD Provinsi DKI Jakarta
4	Program Peningkatan Penanaman Modal	7.718.737.692	APBD Provinsi DKI Jakarta

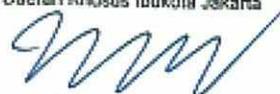
Jakarta, 31 Januari 2020

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Benni Aguscandra
 NIP 196908081997031004



PR INDONESIA **PRIA** PUBLIC RELATIONS INDONESIA AWARDS 2020

PIAGAM PENGHARGAAN
Diberikan kepada

**Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta**

**PEMENANG
PR INDONESIA AWARDS 2020**

Kategori Terpopuler di Media
Sub Kategori Pemerintah Provinsi

Jakarta, 20 April 2020
PR INDONESIA



Asmono Wikan
Founder & CEO



PR INDONESIA **PRIA** PUBLIC RELATIONS INDONESIA AWARDS 2020

**SILVER WINNER
PR INDONESIA AWARDS 2020**

Kategori Pemerintah Provinsi
Sub Kategori Video Profil

Dinas PM dan PTSP
Provinsi DKI Jakarta
Jakarta Investment Centre

Jakarta, 20 April 2020
PR INDONESIA



Asmono Wikan
Founder & CEO









SALAM SETIA

SELAMAT PAGI WARGA JAKARTA

Orang sukses mengawali paginya dengan senyuman, segala urusan akan dimudahkan. Yuk kita sambut hari ini dengan penuh semangat. Semangat mengurus izin dan non izin SENDIRI ya

SALAM SETIA #MELAYANIJAKARTA



#MELAYANIJAKARTA

☎ 1500164 🌐 pelayanan.jakarta.go.id 📱 [/PelayananJakarta](https://www.facebook.com/PelayananJakarta) 🐦 [@layananjakarta](https://twitter.com/layananjakarta) 📷 [@layananjakarta](https://www.instagram.com/layananjakarta) 📺 [/layananjakarta](https://www.youtube.com/layananjakarta)

SALAM SETIA

tvOne

1000164
 @pelayan.jakarta.go.id
 #MELAYANIJAKARTA

22 FEBRUARI 2019

PENYAMPAIAN INFORMASI

Relaksasi Perizinan

Jakarta

#MELAYANIJAKARTA

SALAM SETIA

"Duduk diam dirumah, izin usaha selesai. Makasih PTSP dan Jakpreneur!"

Jak Preneur

-Salmah Fitriyanti,
 Pemilik Jajanan Kekoreaan

#MELAYANIJAKARTA

1600164 @pelayan.jakarta.go.id #PelayanJakarta @layananjakarta @layananjakarta @layananjakarta

SALAM SETIA

01 Usaha yang memiliki izin, mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan dari pemerintah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

02 Usaha yang memiliki izin lengkap dan sah akan mendapatkan kemudahan dalam hal pembiayaan perbankan untuk perkembangan usaha.

03 Usaha yang memiliki izin akan lebih mudah ikut serta dalam tender.

04 Usaha lokal yang memiliki izin, memiliki kesempatan untuk memperluas usahanya ke tingkat internasional.

05 Dengan memiliki izin usaha, maka kredibilitas usaha anda baik dan semakin mudah untuk mengikuti promosi melalui pameran yang diselenggarakan pemerintah.

5 Alasan Pentingnya Memiliki Izin Usaha

1600164 @pelayan.jakarta.go.id #PelayanJakarta @layananjakarta @layananjakarta @layananjakarta

#MELAYANIJAKARTA

SALAM SETIA

LANGKAH PENGAJUAN IZIN JAKEVO

JAM AKTIF
 SENIN - JUMAT
 08.00-15.00

1600164 @pelayan.jakarta.go.id #PelayanJakarta @layananjakarta @layananjakarta @layananjakarta

1 Pencarian Izin

2 Pengisian Formulir

3 Konfirmasi

4

#MELAYANIJAKARTA

SALAM SETIA

URUS IZIN DAN
NON IZIN ONLINE
MUDAH DAN
GAK RIBET

JAKEVO
SIMPAN PERIZIN DAN IZIN

AJIB
Amar Simpul
Bisa Berjalan

URUS IZIN SENDIRI
ITU MUDAH

Download Jakevo mobile dan AJIB di :

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

#MELAYANIJAKARTA

☎ 1500164 🌐 pelayanan.jakarta.go.id 📺 PelayananJakarta 🐦 @layananjakarta 📷 @layananjakarta 📺 /layananjakarta

SALAM SETIA

Hello Warga Jakarta

TANYA PTSP 1500 164

#MELAYANIJAKARTA

☎ 1500164 🌐 pelayanan.jakarta.go.id 📺 PelayananJakarta 🐦 @layananjakarta 📷 @layananjakarta 📺 /layananjakarta

SALAM SETIA

#MELAYANIJAKARTA

☎ 1500164 🌐 pelayanan.jakarta.go.id 📺 PelayananJakarta 🐦 @layananjakarta 📷 @layananjakarta 📺 /layananjakarta

DOKUMENTASI LAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK

beritaPMP TSP

SALAM SETIA

Jawa Pos



TASK FORCE COVID-19, Pelayanan publik tetap buka sesuai prosedur di sejumlah tempat di DKI, termasuk di mal ini.

#MELAYANIJAKARTA

Jakarta

1500164 @pelayananjakarta.go.id #PelayananJakarta @layananjakarta @layananjakarta

SALAM SETIA



#JAGAJAKARTAUNTUKSEMUA

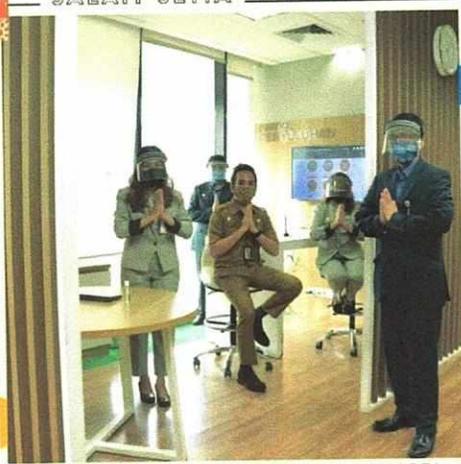
Terapkan protokol kesehatan dan pembatasan jarak antar manusia saat mengakses pelayanan publik

Jakarta

#MELAYANIJAKARTA

1500164 @pelayananjakarta.go.id #PelayananJakarta @layananjakarta @layananjakarta

SALAM SETIA



#MELAYANIJAKARTA

1500164 @pelayananjakarta.go.id #PelayananJakarta @layananjakarta @layananjakarta

SALAM SETIA



#MELAYANIJAKARTA

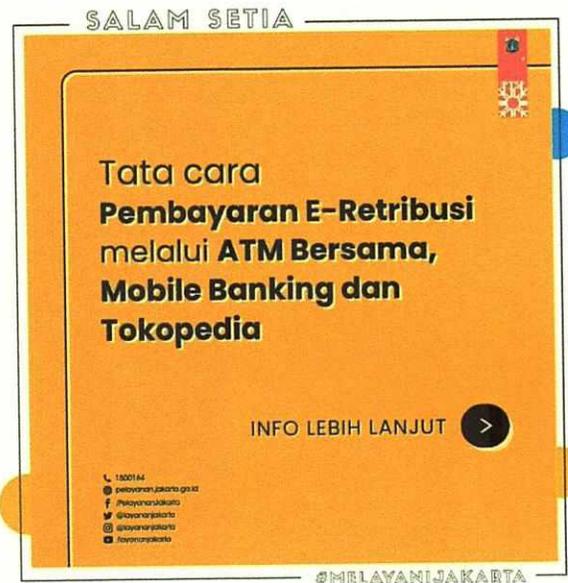
1500164 @pelayananjakarta.go.id #PelayananJakarta @layananjakarta @layananjakarta

MAL PELAYANAN PUBLIK PROVINSI DKI JAKARTA

Perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan yang nyata bagi warga masyarakat. Layanan yang ada di Mal Pelayanan Publik antara lain: Direktorat BPJ Korpri DKI Jakarta terdapat berbagai pelayanan yaitu: ditjen pajak, ditjen imigrasi, ditjen AHU ditjen bea dan cukai, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, BPN. Ditjen Mal ini terus berkembang.



1500164 @pelayananjakarta.go.id #MELAYANIJAKARTA @layananjakarta



DOKUMENTASI KUNJUNGAN DALAM RANGKA BEST PRACTICE LAYANAN DAN INOVASI DPMPSTP

**KUNJUNGAN BKPSDM KAB. BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**
28 NOVEMBER 2018



Salam SEJIA #Melayarijakarta

1500144 | pelayanan.jakarta.go.id | @melayarijakarta | @melayarijakarta | @melayarijakarta

**KUNJUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA (BKN)**
6 DESEMBER 2018



Salam SEJIA #Melayarijakarta

1500144 | pelayanan.jakarta.go.id | @melayarijakarta | @melayarijakarta | @melayarijakarta

**KUNJUNGAN INSTITUT PEMERINTAH
DALAM NEGERI (IPDN)**
24 NOVEMBER 2018



Salam SEJIA #Melayarijakarta

1500144 | pelayanan.jakarta.go.id | @melayarijakarta | @melayarijakarta | @melayarijakarta

**KUNJUNGAN DPMPSTP PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**
23 NOVEMBER 2018



Salam SEJIA #Melayarijakarta

1500144 | pelayanan.jakarta.go.id | @melayarijakarta | @melayarijakarta | @melayarijakarta

**KUNJUNGAN KEMENLU
REPUBLIK INDONESIA**
27 NOVEMBER 2018



Salam SEJIA #Melayarijakarta

1500144 | pelayanan.jakarta.go.id | @melayarijakarta | @melayarijakarta | @melayarijakarta

**KUNJUNGAN UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945**
22-11-2018

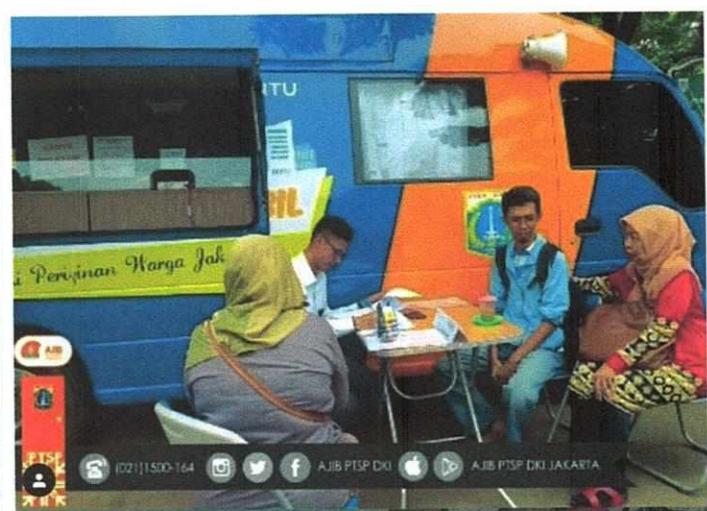


Salam SEJIA #Melayarijakarta

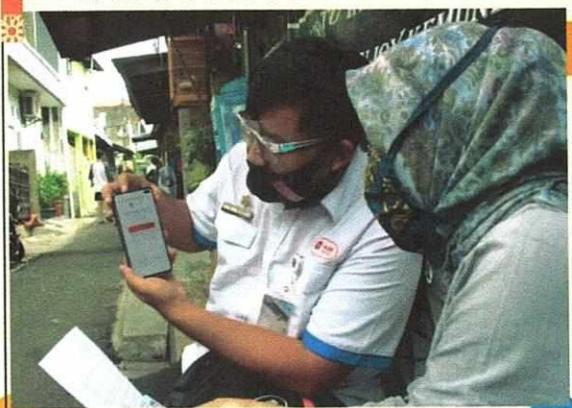
1500144 | pelayanan.jakarta.go.id | @melayarijakarta | @melayarijakarta | @melayarijakarta

DOKUMENTASI LAYANAN AJIB

**Gak Ada Waktu
Urus Izin dan Non Izin?
Di AJIB-in AJA**



SALAM SETIA



#MELAYANIJAKARTA

1500164 pelayan.jakarta.go.id #MelayaniJakarta @MelayaniJakarta

beritaPMPTSP

SALAM SETIA



#DiAJIBinAja, Urus Izin "On-line" Jadi Makin Seru

Stasi Perawatan Mandi dan Pelayanan Warga Kota Pusat (SPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menjadi pilihan layanan resmi layanan digital dengan Logo Berencana (AJIB). Layanan ini diadopsi untuk meningkatkan praktik pelayanan siswa calon perantau.

Peraturan AJIB merupakan inovasi pelayanan publik yang dapat diakses secara online. Layanan ini diadopsi untuk meningkatkan praktik pelayanan siswa calon perantau. Layanan ini diadopsi untuk meningkatkan praktik pelayanan siswa calon perantau.



1500164 pelayan.jakarta.go.id #MelayaniJakarta @MelayaniJakarta

DOKUMENTASI LIPUTAN LAYANAN DPMPSTP

beritaPMPTSP

SALAM SETIA

WARTA KOTA

Dinas PMPTST Optimalkan Layanan Daring JakEVO

Persepsi jaman akan berkembang kembali dan diadopsi sesuai kebutuhan yang berlaku setelah masa Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid 19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta dinyatakan berakhir. Rencana persiapan tidak berfokus bagi perubahan persentasi bidang kesehatan baru dan/atau yang melakukan perubahan identitas pemakai, jasa usaha/praktik maupun dalam terdapat persentasi bidang kesehatan tersebut.

"Bagi pemohon baru dan/atau perubahan persentasi maka pemohon tetap diharuskan menggunakan persentasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rekaman persentasi tidak berlaku bagi mereka," ucap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPSTP DKI Jakarta, Aguswinidi.

Di samping itu, DPMPSTP DKI Jakarta juga mengoptimalkan persentasi Surat Izin Praktek (SIP) Through Kesehatan melalui pelayanan

daring JakEVO Jakarta.go.id atau aplikasi JakEVO pada Android dan iOS. Adapun persentasi berupa Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, dipgikan dan rekamasi di sistem data organisasi profesi sesuai wilayah tempat praktik untuk sementara dapat dipgikan dengan Persetujuan pemohon.

"Memulai pemohon wajib mencantumkan STR dan melengkapi lainnya setelah masa Tanggap Darurat Covid-19 dinyatakan berakhir," katanya. (JH)

#MELAYANIJAKARTA

1500164 @pelayanjakarta.go.id | f/pelayanjakarta | @pelayanjakarta | @pelayanjakarta | @pelayanjakarta

beritaPMPTSP

SALAM SETIA

MI MEDIA INDONESIA

BALAI KOTA

Pelayanan Publik Prima selama PSBB

Untuk memastikan layanan publik prima selama PSBB, DPMPSTP DKI Jakarta melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan publik secara daring. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPSTP DKI Jakarta, Aguswinidi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai layanan daring untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik. "Kami telah menyiapkan berbagai layanan daring, seperti pendaftaran, pengajuan, dan pengurusan dokumen. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik prima selama PSBB," katanya.

#MELAYANIJAKARTA

1500164 @pelayanjakarta.go.id | f/pelayanjakarta | @pelayanjakarta | @pelayanjakarta | @pelayanjakarta

beritaPMPTSP

SALAM SETIA

WARTA KOTA

Pengguna SIKM Tembus 1 Juta Orang

Keberhasilan Sistem Informasi Keuangan Masyarakat (SIKM) DKI Jakarta telah mencapai 1 juta pengguna. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPSTP DKI Jakarta, Aguswinidi mengatakan, pencapaian ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. "Kami sangat bangga dengan pencapaian ini, yang menunjukkan bahwa layanan publik kami telah semakin maju dan modern," katanya.

#MELAYANIJAKARTA

1500164 @pelayanjakarta.go.id | f/pelayanjakarta | @pelayanjakarta | @pelayanjakarta | @pelayanjakarta

INVESTOR DAILY

JIC akan Tingkatkan Investasi di DKI Jakarta

14 Agustus 2020 17:38

Jakarta - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi DKI Jakarta, Aguswinidi mengatakan, Jawa Investment Center (JIC) akan meningkatkan investasi di DKI Jakarta. "Kami akan meningkatkan investasi di berbagai sektor, seperti infrastruktur, kesehatan, dan teknologi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta," katanya.

Di samping itu, DPMPSTP DKI Jakarta juga mengoptimalkan persentasi Surat Izin Praktek (SIP) Through Kesehatan melalui pelayanan daring JakEVO Jakarta.go.id atau aplikasi JakEVO pada Android dan iOS. Adapun persentasi berupa Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, dipgikan dan rekamasi di sistem data organisasi profesi sesuai wilayah tempat praktik untuk sementara dapat dipgikan dengan Persetujuan pemohon.

#MELAYANIJAKARTA

1500164 @pelayanjakarta.go.id | f/pelayanjakarta | @pelayanjakarta | @pelayanjakarta | @pelayanjakarta

beritaPMPTSP

SALAM SETIA

Kontan

Layanan Publik di Tengah Pandemi



#MELAYANIJAKARTA

1500164 @pelayanjakarta.go.id | f/pelayanjakarta | @pelayanjakarta | @pelayanjakarta | @pelayanjakarta

KOMPAS

TEKNIK USAHA

JakEVO, Singkat dan Cegah Calo

Jakarta, 14 Agustus - Pengujian ini sudah di DKI Jakarta dipergikan di satu jam setelah diadopsi oleh para pengguna. Keberhasilan ini dipergikan dengan persentasi optimal. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPSTP DKI Jakarta, Aguswinidi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai layanan daring untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik. "Kami telah menyiapkan berbagai layanan daring, seperti pendaftaran, pengajuan, dan pengurusan dokumen. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik prima selama PSBB," katanya.

#MELAYANIJAKARTA

1500164 @pelayanjakarta.go.id | f/pelayanjakarta | @pelayanjakarta | @pelayanjakarta | @pelayanjakarta

13.02 WIB RAMA HAJI, BUB KERTAJATI BELUM BISA JADI PEMBERANGKATAN HAJI TA
HEADLINE NEWS
LAYANAN PUBLIK PASCALIBUR LEBARAN
METRO TV

24 21:47 SPARANSI PENGELOLAAN APBN KEMENTERIAN ESDM TINGKATKAN
BERITA SATU LIVE
APLIKASI JAKARTA EVOLUTION
MONEY REPORT



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA**



**URUS
IZIN
SENDIRI
ITU
MUDAH**

SETIA #MelayaniJakarta

**Gedung Mal Pelayanan Publik
Jl. HR. Rasuna Said Kav C 22**

 1500164

 pelayanan.jakarta.go.id

 /Pelayanan.Jakarta

 @layananjakarta

 @layananjakarta

 /layananjakarta